

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian Tugas Akhir ini mempunyai 2 tujuan penelitian yaitu mendiskripsikan Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan menganalisa hambatan dalam Prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Dinas pertanian Perkebunan dan kehutanan kabupaten Semarang. Mengenai dua tujuan penelitian tersebut akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan oleh peneliti berkaitan dengan Prosedur kenaikan pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, sebagai berikut :

4.1.1. Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler

Prosedur kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dimulai dari BKD akan memberikan surat edaran kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, kemudian SKPD memberikan usulan beserta syarat yang telah ditentukan kepada BKD dan selanjutnya diverifikasi, jika memenuhi persyaratan usulan tersebut akan dientri ke dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terhubung langsung dengan BKN pusat, kemudian berkas yang sudah memenuhi persyaratan akan dikirimkan kepada BKN Jogjakarta dan dilakukan verifikasi ulang, BKN Jogjakarta akan mengirimkan nota usul kenaikan pangkat kepada BKD, selanjutnya BKD akan membuat SK (Surat Keputusan) kenaikan pangkat

dan meneliti ulang (pangkat terakhir, jabatan, gaji pokok lama, gaji pokok baru, dan masa kerja), SK tersebut akan diajukan beserta memorandum penjelasannya kepada Walikota Semarang, setelah Walikota Semarang memberikan tandatangan BKD akan membuat salinan dan memberikan cap, salinan tersebut akan disimpan oleh BKD sebagai arsip dan SK yang asli akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

4.1.2. Hambatan dalam Prosedur Kenaikan Pangkat di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang

4.1.2.1. Pengarsipan Dokumennya yang tidak tersusun secara rapi

Terdapat hambatan pada pengarsipan dokumennya di Sub Bagian Kepegawaian dinas Pertanian perkebunan dan kehutanan Kabupaten Semarang. Hal ini tentunya menjadi menghambat dalam kelengkapan berkas yang akan diperlukan untuk melengkapi syarat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebab berkas-berkas untuk kenaikan pangkat seperti SK Kenaikan Pangkat, Ijazah, SK Jabatan, dan lain sebagainya disimpan di Sub Bagian Kepegawaian. Tentunya dengan adanya gangguan ini diperlukan waktu lebih lama untuk mencari berkas-berkas yang akan digunakan dalam kenaikan pangkatnya, maka hal ini tentu perlu untuk diperbaiki lagi sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan

4.1.2.2. Berkas yang tidak lengkap

Ketidaklengkapan berkas terjadi dikarenakan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang tidak sesuai karena SKP adalah pengganti DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan bersifat baru dan PAK terakhir tidak sesuai dengan perhitungan dan lain- lain.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian tentang Hambatan pelaksanaan kegiatan Prosedur kenaikan pangkat pegawai di Dinas pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang maka peneliti mengajukan beberapa saran. Untuk meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat pegawai di Dinas Pertanian perkebunan dan kehutanan Kabupaten, maka diperlukan :

1. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saran yang dapat diberikan penulis terhadap Sub Bagian Kepegawaian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang adalah pembuatan sistem data Pegawai Negeri Sipil yang hendak naik pangkat. Sistem kearsipan tersebut dapat berupa Bank Data yang berguna sebagai tempat penyimpanan data, sehingga dapat memperlancar kenaikan pangkat dan mempermudah dalam pencarian datanya lebih cepat, serta juga dapat mencegah apabila suatu saat ada arsip yang hilang.
2. Pembaharuan (*upgrade*) sistem pencarian otomatis data PNS di dalam data induk pusat, sehingga Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Semarang tidak perlu mencari data PNS secara manual. Pembaharuan ini bisa berupa perbaikan sistem aplikasi data induk pusat atau

penambahan data PNS di dalam data induk pusat. Dengan adanya pencarian data otomatis di dalam aplikasi data induk pegawai pusat, maka perbaikan data pegawai yang salah input dalam usul kenaikan pangkat dapat segera diatasi secara optimal dan proses kenaikan pangkat pilihan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang berkelanjutan.